

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Asshiddiqie, Jimly, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konpress, 2020.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdurahman, Ali, *et. al.*, *Buku Ajar Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2015.
- Anggono, Bayu Dwi, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konpress, 2020.
- Budiarjo Mirian, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Christiawan, Rio, *Omnibus Law; Teori dan Penerapannya*, cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hardiman, F.Budi, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Huda, Ni'matul, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- J.H.G van den Broek, *Omgevingswet Compleet Tekst & Toelichting Voor Studie en Praktijk*, Amsterdam: Berghauser Pont Publishing Postbus, 2018.

- Kusumohamidjojo, Budiono, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016.
- Krutz, Glen S., *Hitching a Ride: Omnibus Legislating in the U.S. Congress*, Ohio State University Press, 2001.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, USA: Harvard University Printing Office Cambridge, 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2022.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, cetakan pertama, Jakarta: Red and White Publishing, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. ke-13, Jakarta: Kencana, 2017.
- _____, *Teori Hukum*, cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2022.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Penerjemah Raisul Muttaqien, cetakan ke-IV, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Perdana, R. Herlambang dan Boedhi Wijarjo, “Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat”, (Jakarta, Raca Institute-YLBHI, 2001.
- Peter Noll, *Gesetsgebunglehre*, Reinbek: Rohwohlt, 1973.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raz, Joseph, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, New York, USA: Oxford University Press, 1979.

- Redi, Ahmad dan Ibnu Sina Chandranegara, dkk, *Omnibus Law; Diskursus Pengadopsiannya ke-Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional*, cetakan ke-2, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, cetakan ketuga, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Sumardjono, Maria S.W., *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- _____, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Penyusunan*, edisi revisi buku dua, cetakan kesatu, Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- _____, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, cetakan ke-1 buku kesatu, Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1986
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke- 21, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik; Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, cetakan ke-12, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2023.
- Setiadi, Wicipto, *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Tim PSHK UII, *Daya Lenting Konstitusi; Teori, Konsep dan Praktiknya dalam UUD Nri 1945*, Yogyakarta, PSHK FH UII, 2022.
- Taufik, Giri Ahmad dan Rahayu Prasetianingsih, *Regulasi yang Baik” Teori, Praktik, dan Evaluasi*, cetakan ke-1, Bandung: Unpad Press, 2021.
- Van der Vlies, I.C., *Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Terj. Linus Doludjawa, Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dept. Hukum dan Ham RI, 2005.
- Wintgens, Luc J., *Legisprudence: Practical Reason in Legislation*, London: Ashgate Publishing Limited, 2012.

_____. “legitimacy and Legitimation from the Legisprudence Perspective”, dalam Luc. J Wintgens, Phillipe Thion (eds), *Legisprudence in Context: Essay in Legisprudence*, United Kingdom: Taylor and Francis, 2007.

_____. *Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation*, Ed. Luc J. Wintgens, Oxford and Portland: Hart Publishing, 2002.

Walkland, S.A., *The Legislative Process in Great Britain*, New Yrok-Washington: Frederick A. Praeger Publisher, 1968.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

B. Jurnal Ilmiah

Aditya Zaka Firma dan Abdul Basid Fuadi, “Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol 1, no. 1 (Maret 2021).

Amin Rizal Irvan, dan Achmad, “Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Res Publica*, vol 4, no. 2 (Agustus 2020).

Arie, Marthen, “An Approach of Legisprudence Theory to Assess the Quality of Local Regulation,” *Hasanuddin Law Review*, 2, 3 (2016).

Bawazier, Fuad, “Reformasi Peraturan Perundangan dan Birokrasi Bidang Perpajakan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 8 Nomor 1 (2011).

Dhiskshita, Ida Bagus Gede Putra Agung, Deni Clara Sinta, dan Candra Dewi Irawan, “Politik Hukum dan *Quo Vadis* Pembentukan Undang-Undang dengan Metode *Omnibus Law* di Indonesia:”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 19, no. 2 (2022): 165-184.

Erwin Chemirinsky, “Substantive Due Process”, *Touro Law Review*, Vol. 15 (1999).

Fajri, M. Nurul, “Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Konsitusi*, vol. 20, no. 1 (Maret 2023).

Fadli, Muhammad, “Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 15, no. 1 (2018).

- Florjin, Nico, “The Instruction for Legislation in the Netherlands: A Critical Appraisal”, *Legisprudence*, Vol. 4 Number 2 (2010).
- Gusman, Delvina, “Kajian Ontologi Problematika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Dikaitkan Dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat”, *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 6 no. 4 (Januari 2023).
- Goldfeld, Victor, “Legislative Due Process and Simple Interest Group Politics: Ensuring Minimal Deliberation Through Judicial Review of Congressional Processes”, dalam *New York University Law Review*, Vol. 79 (2004): 367-420.
- Halim, Fatimah, “Hukum dan Perubahan Sosial”, *Al Daulah*, vol. 4, no. 1 (2015).
- Hamdhani, Ali Fikri dan Fajrianto, “Relevansi Penerapan Metode *Omnibus Law* dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, vol. 5, no. 1 (Februari 2024): 31-40.
- House of Lord Select Committee on the Constitution, *Coroners and Justice Bill*, 10th Report of Sessions 2008-09, London: House of Lords Stationary Office Limited, 2009.
- Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 no. 1 (2020).
- Iqbal, Firdaus Muhammad, “Kontribusi Sistem *Civil Law* (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 4 no. 2 (Desember 2022).
- Kirchhoff, Denis dan Leonard J.S. Tsuji, “Reading between the Lines of the ‘Responsible Resource Development’ Rhetoric: the Use of Omnibus Bill to ‘Streamline’ Canadian Environmental Legislation”, *Impact Assessment and Project Appraisal*, vol. 32, no. 2 (2014).
- L.G. Chiozza Money, *Money’s Fiscal Dictionary*, London: Methuen & Co, 1910.
- Michelman, Frank L., “The Not So Puzzling Persistence of The Futile Search: Tribe on Proceduralism in Constitutional Theory”, *Tulsa Law Review*, no. 42 (2007).
- Massicote, Louis, “Omnibus Bill in Theory and Practice”, Canadian Parliamentary Review/Spring 2013.
- O'Brien, Audrey & Marc Bosc, eds, *House of Commons Procedure and Practice*, 2nd ed (Cowansville QC: House of Commons & Editions Yvon Blais, 2009).

- Openasutralia, “Civil Law and Justice (Ombus Amendments) Bill 2015; Second Reading”.
- Prasetyo, Yogi, “Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 20 no. 2 (Juni 2023).
- Roy Gava, Julien M Jaquet, and Pascal Sciarini, “Legislating or Rubber-stamping? Assessing Parliament’s Influence on Law-making with Text Reuse”, *European Journal of Political Research*, Vol. 60, no. 1 (2020).
- Rishan, Idul, “Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi”, *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 1 (2022).
- Suntoro, Agus dan Kania Rahma Nureda, “Omnibus Law: Dominasi Kekuasaan Eksekutif dalam Pembentukan Legislasi”, *Veritas et Justitia*, vol. 8, no. 1 (Juni 2022): 109-139.
- Sumantry, Deden, “Reformasi Perpajakan sebagai Perlindungan Hukum yang Seimbang antara Wajib Pajak dengan Fiskus sebagai Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Perpajakan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 8 Nomor 1 (2011).
- Ummah, Vina Rohmatul, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, vol. 2, no. 2 (Desember 2022).
- Vareen Vanterpool, “A Critical Look at Achieving Quality in Legislation”, *European Journal of Law Reform*, Vol. 9 Number 2 (2007).
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, Muhammad Dzikirullah H Noho & Aga Natalis, “The adoption of various legal systems in Indonesia: an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems”, *Cogent Social Sciences*, vol 8, no1 (2022).
- Wintgens, Luc J., “Legisprudence as A New Theory of Legislation”, *Ratio Juris*, vol. 19, no. 1 (March 2006): 1-25
- Yunus, Nur Rohim, Fitriyani Zein, dan Amrizal Siagian, “Civil Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal System”, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, vol. 9, no. 5 (2022).

Zulfan, “Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau tentang Perjanjian Sosial”, *Serambi Academica*, vol. VI, no. 2 (November 2018): 30-35.

C. Penelitian (Disertasi, Tesis, Skripsi) Makalah, dan Laporan

Attamimi, A Hamid S, “Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita 1 – Pelita IV”, Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990).

Asmie, Muammar, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Regulatory Practices dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.

Buana, Mirza Satria, “Menakar Konsep *Omnibus Law* dan *Consolidation Law* untuk Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia: Pendekatan Perbandingan Hukum Tata Negara”, Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-4 “Penataan Regulasi di Indonesia”, Jember, 2017.

DPR RI, *Risalah Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan MenkoPolhukam, MenkoPerekonomian, dan Menkumham terkait Pembahasan RUU Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rapat 17 April 2022*, Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2022.

Febrinandes, Helmi Lavour, “Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Indonesian Report, The Indonesian Institute: Center for Public Policy Research, 2020.

Harijanti, Susi Dwi, Lailani Sungkar, dan Wicaksana Dramanda, *Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji*, Laporan Hasil Penelitian, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2020.

Hadjon, Philipus M., “Analisis terhadap UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, makalah dalam Seminar Hukum Nasional “Implementasi UU No. 10 Tahun 2004 dalam Legislasi Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004”, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21 Mei 2005.

Hidayat,Rofiq,“Indeks Kinerja Legislasi DPR Periode 2021 Dinilai Tidak memuaskan,” hukumonline.com, 26 Februari 2022. Dapat diakses di [Indeks](#)

[Kinerja Legislasi DPR Periode 2021 Dinilai Tidak Memuaskan \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com). di akses terakhir pada 17 Maret 2024.

Irianto, Sulistiyowati, “Pendidikan Hukum untuk Masa Depan Indonesia: Sebuah Catatan Kritis,” Makalah pada Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ke-74, Yogyakarta, tgl/2/2020).

Juwana, Stephanie, dkk, “Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making”, Policy Brief 4, Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020.

Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*, Jakarta: Bappenas, 2011.

Laporan Komisi XI DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang Telah Diselesaikan oleh Komisi XI DPR RI Dalam Rapat Paripurna DPR RI”, DPR-RI, 7 Oktober 2021, diakses tanggal 25 Oktober 2021, 1-3. [persipar-Laporan-AKD-Laporan-Komisi-XI-DPR-RI-terhadap-RUU-tentang-Harmonisasi-Peraturan-Perpajakan-1633596532.pdf](#)

Laporan Komisi IX DPR RI Mengenai Hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Atas RUU tentang Kesehatan. Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 11 Juli 2023. Halaman 2-4. Dapat diakses pada link [Paripurna-RJ-20230809-071430-1805.pdf](#).

Matti Niemivuo, *Legislative Drafting Process: Main Issue and Some Examples*, Unidem Campus Trieste Seminar, Venice Commision, 14 - 17 Juni 2010.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Legislasi Masa Pandemi; Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020*, Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebiasaan Indonesia, 2021.

Riyanto, Sigit, et al, “Kertas Kebijakan: Catatan Kritis terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.

Saputra, Asri Rezki, “Problematisasi Fast-Track Legislation dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel *Relevansi Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Upaya Perlindungan Hak Asasi Warga Negara dalam Negara Hukum Demokratis*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2024.

Umam, Ahmad K, "Koreksi Total Kinerja Demokrasi dan Antikorupsi." *Demokrasi Tanpa Demos Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi Di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, (2021): 291-302.

Wibowo, Torik Abdul Aziz, "Politik Hukum Pengaturan Metode Omnibus Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia", *Abstrak Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2023.

Wiratraman, Herlambang P, "Legisprudence dan Pendekatan Sosio-Legal dalam Pembentukan Hukum: Konteks Indonesia," Makalah pada Continuing Legal Education (CLE) tentang Kontribusi Teori Legisprudensi dalam Pembentukan Hukum Nasional, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 28/11/2012.

Yusuf, Muhammad, "Politik Hukum Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2023.

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945.

E. Internet/website

Badan kebijakan Fiskal, “Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”, Lihat pada link berikut <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/undang-undang-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan-uu-p2sk-6914bab6/detail/> terakhir diakses pada 23 Mei 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Program Legislasi Nasional Prioritas. Akses pada [Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](http://www.dpr.go.id/). Duhaime's Law Dictionary, "Omnibus Bill", [http://www.duhaime.org/LegalDictionary/ OmnibusBill.aspx](http://www.duhaime.org/LegalDictionary/OmnibusBill.aspx). diakses 2 Mei 2024.

Fadilah, Ilyas, “Buruh Bakal Gugat UU P2SK, Singgung Pasal Selundupan Soal JHT. 29/12/2022. Lihat <https://finance.detik.com/moneter/d-6487629/buruh-bakal-gugat-uu-p2sk-singgung-pasal-selundupan-soal-jht>. Terakhir diakses pada 23 Mei 2024.

Fauzia, Mutia “Sri Mulyani Sebut Tujuan *Omnibus law* untuk Keluarkan Indonesia dari Middle Income Trap, 12/10/2020. Dapat diakses pada [Sri Mulyani Sebut Tujuan Omnibus Law untuk Keluarkan Indonesia dari Middle Income Trap Halaman all - Kompas.com](https://www.kompas.com). Terakhir diakses pada 28 Mei 2024.

Hakim, Rakhmat Nur “Mahfud Sebut Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bisa Diperbaiki”, 18/02/2020. Dapat diakses pada [Mahfud Sebut Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bisa Diperbaiki \(kompas.com\)](https://www.kompas.com). terakhir diakses pada 28 Mei 2024.

Hukum Online, “Melihat Kembali Urgensi Lahirnya UU HPP”, 3/12/2021. Diakses pada [Melihat Kembali Urgensi Lahirnya UU HPP \(hukumonline.com\)](http://www.hukumonline.com). terakhir diakses pada 29 Mei 2024.

Kementerian Keuangan, “UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 8 Oktober 2021. Dapat diakses [Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Menkeu: UU HPP Upaya Optimalkan Penerimaan Negara yang Berkeadilan \(setkab.go.id\)](http://setkab.go.id). Diakses tanggal 28 Mei 2024.

- Nalle, Victor Imanuel, “Legislasi dan Persoalan Legitimasi”, Kompas.com 14/02/2022. Dapat diakses pada link [Legislasi dan Persoalan Legitimasi \(kompas.com\)](http://kompas.com). Diakses pada 24 mei 2024.
- Persada, Syailendra, “Menaker Akui BIN – Polri Ikut Bertemu Buruh Bahas Omnibus Law”, 13/02/2020. Lihat dalam [Menaker Akui BIN - Polri Ikut Bertemu Buruh Bahas Omnibus Law - Nasional Tempo.co](http://nasionaltempo.co). terakhir diakses pada 28 Mei 2024.
- Rishan, Idul, “Trasnformasi Kinerja Legislasi”, 24/06/2022. [Transformasi Kinerja Legislasi - Kompas.id](http://kompas.id). terakhir diakses pada 23 Mei 2024.
- Saputra, Andi, “Lagi, Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dugugat ke MK”, 24/01/2022. Lihat pada <https://news.detik.com/berita/d-5911618/lagi-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan-digugat-ke-mk> . Diakses pada 24 Mei 2024.
- Subarkah, Tri, “Pakar Prediksi Indeks Demokrasi Indonesia Merosot Lagi Tahun Depan”, 17/02/2024. Dapat diakses pada [Pakar Prediksi Indeks Demokrasi Indonesia Merosot Lagi Tahun Depan \(mediaindonesia.com\)](http://mediaindonesia.com). diakses pada 17 Mei 2024.
- Saputra, Muhammad Genantan, “Jokowi sampaikan Manfaat *Omnibus law* Cipta Kerja di Forum APEC”, 19/11/2020. Dapat diakses pada [Jokowi sampaikan Manfaat Omnibus Law Cipta Kerja di Forum APEC \(merdeka.com\)](http://merdeka.com). terakhir diakses 28 Mei 2024.
- Yahya, Achmad Nasrudin, “Demo Tolak RUU Kesehatan dan Potensi Melemahnya Perlindungan Nakes”, 08/05/2023. Akses pada [Demo Tolak RUU Kesehatan dan Potensi Melemahnya Perlindungan Nakes \(kompas.com\)](http://kompas.com). di akses pada 24 Mei 2024.
- Wiratraman, Herlambang P., “Krisis Politik Legisprudensi,” Kompas, 14/04/2020. Diakses pada [Krisis Politik Legisprudensi - Kompas.id](http://kompas.id). Diakses pada 24 mei 2024.
- Wildan, Muhammad, “UU HPP Digugat ke MK, Sidang Mulai Minggu Depan, 09/02/2022. [UU HPP Digugat ke MK, Sidang Mulai Minggu Depan \(ddtc.co.id\)](http://ddtc.co.id), terakhir diakses pada 24 Mei 2024.
- Yuliawati, “Gemuknya Omnibus Law RI di Bandingkan Amerika, Inggris dan Jerman, dapat di lihat [Gemuknya Omnibus Law RI dibandingkan Amerika, Inggris dan Jerman - Nasional Katadata.co.id](http://nasional.katadata.co.id). terakhir akses pada 27 Mei 2024.